

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik Teori dan Standar Akuntansi Sektor Publik Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2004) teori memiliki tiga karakteristik dasar yaitu:

- 1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*).
- 2) Kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*).
- 3) Kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Indra Bastian (2014:6) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara serta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Sedangkan Menurut Erlina,dkk (2015) Akuntansi Sektor Publik adalah proses

pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik seperti partai politik, masyarakat, sekolah, universitas dan lain-lain. Pada dasarnya terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu:

1. Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini.
2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan.
3. Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Pengembangan teori sektor publik untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*).

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah (Juwita, 2013). Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik.

Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi

yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan.

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri.

2.1.3. Peran Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1990) dalam *Glynn* (1993) menyatakan peran akuntansi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya serta memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah atas penggunaan dana publik.

2.1.4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hartoto (2023: 32) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Kontrol yaitu sebagai pengendali manajemen dan akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien serta memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah di andalkan dalam lembaga publik.
2. Akuntabilitas yaitu memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik, *accountability* digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggungjawab atau sumber daya atau bidang atau divisi yang berada dalam wewenang manajer tersebut.

2.1.5. Kompetensi Pengelola Keuangan

2.1.5.1. Pengertian Kompetensi Pengelola Keuangan

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan/tugas yang di landasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan (Wicaksono, 2017:5).

Menurut Rosanti (2017:3), Kompetensi berasal dari kata *Competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, wawenang. Adapun secara etimologi kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan, dan perilaku yang baik. Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut mengandung makna kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Hutapea dan Thoha (2008:4), ada beberapa definisi kompetensi yaitu Boyatzis (1982), kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”. Woodruffle (1991) and Woodruffle (1990) membedakan antara pengertian *competence* dan *competency* yang mana *competence* diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukkan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul”, sedangkan *competency* merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukkan “dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (*competent*)”. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, seleksi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM.

Hutapea dan Thoha (2008:28), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu).

Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.

2.1.5.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Menurut Soleh dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelola keuangan yang diperlukann untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat serta amanah yang diterimanya baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan

yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik yang didasari pada konsep *value for money*, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik.

Apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah baik, hal ini dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah buruk maka dapat menjadi salah satu faktor penurunan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Menurut Defitri (2018) pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat serta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Dalam pengelolaan keuangan suatu Negara maupun daerah, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana,

transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Menurut Halim (2004) mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatannya, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

2.1.5.3. Indikator Kompetensi Pengelola Keuangan

Menurut Havesi (2005) dan Spencer dalam Palan (2007) ada beberapa indikator dari Kompetensi Pengelola Keuangan antara lain:

1. Keterampilan (*Skill*)

Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.

2. Sikap (*attitude*)

Merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan.

3. Pengetahuan (*Knowledge*)

Merupakan fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori, atau melalui introspeksi

diebut priori. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang dengan sebaik-baiknya.

2.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.6.1 Pengertian Sistem

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:1) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013: 22) sistem adalah kumpulan/grup dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa sistem merupakan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.6.2 Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Moh Mahsun dkk.(2016: 92) sistem akuntansi keuangan daerah adalah metode dan prosedur penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan di suatu pemerintah daerah. Sedangkan menurut Warsito Kawedar dkk.(2008: 52) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Adapun menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:58) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam

rangkapertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian suatu sistem akuntansi dari prosedur dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari proses pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan.

Menurut Alam, (2004:8) mendefinisikan bahwa: “sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan,serta pelaporan data keuangan Akuntansi, Dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.

Terkait dengan kualitas laporan keuangan, terdapat beberapa pernyataan yang menggambarkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yaitu: Menurut Bastian (2007) mengemukakan: Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Menurut Mardiasmo (2009), menyatakan: Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Mulyanto dalam Nurillah dan Muid (2014), menyatakan bahwa: Pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan

yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Mengacu padapernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dinilai lebih memberi manfaat dalam memberikan informasi yang lebih lengkap, informasi yang lebih lengkap ini akan mendukung pemerintah daerah saat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan daerah ini juga mampu menghasilkan informasi guna penyusunan laporan keuangan yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas sesuai SAP yang berlaku tentang laporan keuangan yang lebih komprehensif. Artinya, apabila sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan efektif, maka akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Mulyadi pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang memudahkan manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dilakukan mulai dari input berupa transaksi keuangan, proses dalam bentuk analisis transaksi sebagaimana ditunjukkan dalam catatan-catatan atau jurnal, dan output berupa laporan keuangan.

Menurut Abdul Halim Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan melaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota,

atau provinsi) yang digunakan sebagai informasi dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, rakyat, analis dan pemerhati pemda, dan pemerintah pusat.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Kegunaan Sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Herawati, 2017).

2.1.6.3 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan Akuntansi Pemerintah menurut Abdul Halim (2004:28) adalah:

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah.

2.1.6.4 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Mahmudi (2019:22) prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi :

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas.

2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran, atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran kas.

3. Prosedur akuntansi selain kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian selain kas.

4. Prosedur akuntansi aset

Prosedur Akuntansi Aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan.

2.1.6.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 59) sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan

- a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- c. Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2. Pengikhtisaran

- a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.

- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3. Pelaporan

Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

2.1.7. **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

2.1.7.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 13) laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia.

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah “Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Yosefrinaldi (2016:3), Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh kapasitas kompetensi pengelolaan keuangan yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknik akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada.

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Rahma et al, 2019). Laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

2.1.7.2 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Menurut Baridwan (1992: 17), laporan keuangan daerah adalah: “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu

stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas laporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 13) laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun menurut Ifat Fauziah (2018:66) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 115) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Dan menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:38) laporan keuangan adalah sebagai berikut : “Pengolahan data keuangan perusahaan diawali dari bukti-bukti transaksi yang berupa faktur, dokumen, nota ,kuitansi dan bukti-bukti transaksi keuangan yang lainnya dan kemudian dicatatkan dalam pembukuan perusahaan sehingga hasil akhir dari proses pencatatan dan pengidentifikasian bukti itu akan akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran disajikan dalam sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan lebih berkualitas.

2.1.7.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2007). Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang mengacu pada penelitian Rohman (2007).

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Havesi, 2005).

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Selain kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sebagaimanaungkapkan mardiasmo (2004:35) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.

2.1.7.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:11) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.
2. Andal artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan, dan mengandung unsur manipulasi.
3. Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna keuangan.

2.1.8 Hubungan Kompetensi Pengelola Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan (Wicaksono, 2017:5).

Kompetensi pengelola keuangan dapat tercermin pada mekanisme pengelolaannya yang baik. Apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah baik,

hal ini dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah buruk maka dapat menjadi salah satu faktor penurunan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Menurut Defitri (2018) pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakatserta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai. Berdasarkan hasil penelitian Lia Hanifa (2016); Andini, (2016); Ade Husna, (2019); Budiman Slamet, (2022); dan Nabila Zubaidi, (2019) menunjukkan bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₁: Kompetensi Pengelola Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.8.1 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Mahfud Solihin, 2017:58). Terkait dengan kualitas laporan keuangan, terdapat beberapa pernyataan yang menggambarkan sistem akuntansi keuangan

daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yaitu jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Bastian (2007).

Dalam mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2009). Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Mulyanto dalam Nurillah dan Muid (2014), menyatakan bahwa pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian Lia Hanifa (2016); Andini, (2016); Ade Husna, (2019); Budiman Slamet, (2022); dan Nabila Zubaidi, (2019) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.8.2 Hubungan Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang berkualitas tentu perlu adanya prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang kompeten dalam bidangnya. Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencapai kinerja tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pengelolaan keuangan perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisien, dan keabsahan pembelanjaan dana (Defitri, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia Hanifa (2016) menunjukkan bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₃: Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2. Penelitian Sebelumnya

Tabel.1.
Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang diteliti, Alat Analisis Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia hanifa	Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - X₁: Pengelolaan keuangan - X₂: Sistem akuntansi keuangan - Y: Kualitas laporan keuangan - Regresi Linier Berganda - Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi sulawesi tenggara baik secara parsial maupun simultan. 	Variabel independen dan dependen	Tempat Penelitian

2.	Budiman Slamet	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Bpkad Kabupaten Bogor)	<ul style="list-style-type: none"> - X_1: Penerapan Sistem Akuntansi - X_2: Pengelolaan Keuangan Daerah - Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah - Regresi Linear Berganda - Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Pengelolaan Keuangan Daerah secara Parsial berpengaruh positif terhadap atas laporan keuangan daerah di Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara 	Variabel independen	Variabel dependen
----	----------------	--	--	---------------------	-------------------

			simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap atas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.		
3.	Ade Husna	Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar	<ul style="list-style-type: none"> - X₁: Kompetensi Pengelolaan Keuangan - X₂: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah - Regresi Linear Berganda - Secara simultan hasil uji F membuktikan bahwa, Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Secara Parsial hasil uji t menandakan adanya pengaruh variabel Kompetensi Pengelolaan 	Variabel independen dan dependen	Tempat Penelitian

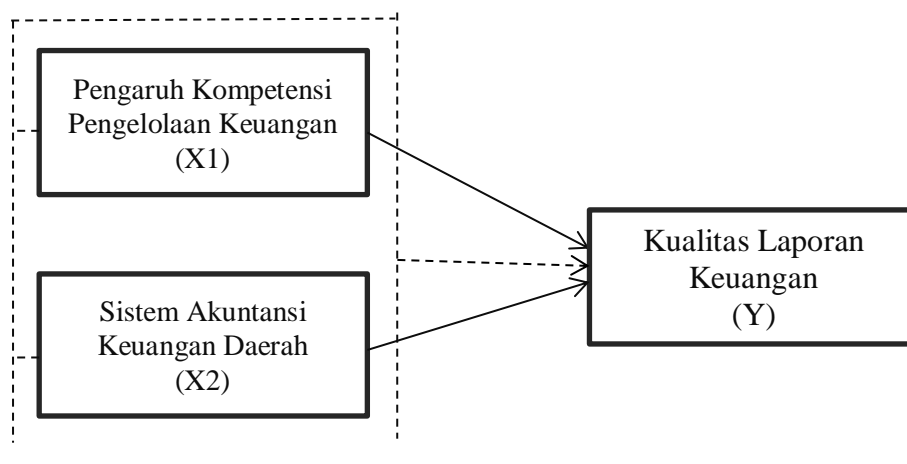
			Keuangan (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Besar, Secara Parsial uji t menandakan adanya pengaruh variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Besar.		
4.	Dewi Andini	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manuasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - X₁: Kompetensi Sumber Daya Manuasi - X₂: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Y: Kualitas Laporan Daerah - Regresi Linear Berganda - Secara parsial variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 	Variabel independen dan dependen	Tempat Penelitian

			Daerah berdasarkan pengujian secara simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD diKabupaten Empat Lawang.		
--	--	--	---	--	--

5.	Emilda Ihsanti	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - X₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia - X₂: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah - Regresi Linear Berganda - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 	Variabel independen	Variabel dependen
----	----------------	--	--	---------------------	-------------------

2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dituliskan di atas maka dapat disimpulkan kerangka pikir untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen dalam hal ini adalah Kompetensi Pengelola Keuangan (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Terhadap Variabel Dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).



Keterangan:

- : Secara Parsial
- - - - - : Secara Simultan

Gambar 1.1
Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Menurut Sujarweni (2016:66) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pikir yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka pikir di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga terdapat Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di

BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baik secara parsial atau simultan.